

Model Revitalisasi Modal Sosial Guna Meningkatkan Pelaksanaan Fungsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Dahlan¹, Yusra²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model revitalisasi modal sosial guna meningkatkan pelaksanaan fungsi anggota DPRD di Aceh. Penelitian dilakukan terhadap Anggota DPR A, DPRK Banda Aceh, DPRK Sabang, DPRK Aceh Besar dan DPRK Pidie dengan total anggota legislatif sebanyak 206 orang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan selanjutnya peralatan analisis data menggunakan structural equation model (SEM) yang dioperasikan dengan software AMOS. Penelitian menemukan bahwa kepribadian dan perilaku *organizational citizenship behavior* (OCB) memiliki peran penting dalam meningkatkan modal sosial anggota DPRD yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan fungsi pengawasan yang mereka lakukan sebagai anggota legislatif. Kepribadian dan perilaku OCB juga berdampak positif dan signifikan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan yang mereka jalankan. Keberadaan modal sosial mampu memediasi pengaruh kepribadian dan perilaku OCB dan fungsi pengawasan. Efek mediasi yang ditimbulkan oleh modal sosial sebagai variabel perantara adalah mediasi parsial.

Kata kunci: pelaksanaan fungsi DPRD, modal sosial, kepribadian dan *organizational citizenship behavior*

Abstract. This study aims to find a model for revitalizing social capital in order to improve the implementation of the DPRD member functions in Aceh. The study was conducted on Members of the DPR A, the Banda Aceh DPRK, the Sabang DPRK, the Greater Aceh DPRK and the Pidie DPRK with a total of 206 legislative members. Data collection using questionnaires and then data analysis equipment using a structural equation model (SEM) which is operated with AMOS software. The study found that the personality and behavior of *organizational citizenship behavior* (OCB) had an important role in increasing the social capital of DPRD members which in turn had an impact on improving the supervisory function they carried out as legislators. OCB's personality and behavior also have a positive and significant impact on the implementation of the supervisory functions they carry out. The existence of social capital is able to mediate the influence of OCB personality and behavior and supervisory functions. The mediating effect of social capital as an intermediate variable is partial mediation.

Keywords: implementation of DPRD function, social capital, personality and *organizational citizenship behavior*

*Corresponding author. Email: dahlan@stiesabang.ac.id, yusra@stiesabang.ac.id

Received: 7 Juni 2018, Revision: 12 Juni 2018, Accepted: 20 Juli 2018

Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204.

Copyright © 2017. Published by Divisi Riset, Lembaga KITA.

Pendahuluan

Keberadaan DPRD di Aceh baik ditingkat provinsi maupun kabupaten kota diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Kemampuan lembaga legislatif tersebut dalam menjalankan fungsinya tentunya tidak terlepas dari kinerja seluruh anggota legislatif, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kenyataan menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi anggota DPRD Aceh juga tidak jauh berbeda bila dibandingkan dengan di daerah lain. Bahkan dalam beberapa kasus tertentu, pelaksanaan fungsi legislatif di Aceh seperti DPRA misalnya sering menjadi sorotan masyarakat. Adanya perbedaan pendapat diantara sesama anggota DPRA dalam menyoroiti persoalan tertentu seperti dana aspirasi misalnya, merupakan salah satu indikasi nyata rendahnya adanya persoalan dalam pelaksanaan fungsi legislatif di Aceh. Belum lagi dengan persoalan anggaran daerah yang setiap tahun anggaran pembahasannya diwarnai banyak perdebatan antara legislatif dan eksekutif di Aceh merupakan sinyal penting belum terlaksananya fungsi anggota dewan perwakilan daerah secara baik.

Persoalan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi legislatif dan selanjutnya berdampak pada kinerja organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Aceh sebenarnya tidak hanya wujud ditingkat provinsi, tetapi juga ditingkat kabupaten kota. Hal ini tentunya tidak terlepas berbagai faktor seperti modal sosial, kepribadian dan perilaku kewargaan organisasi (*organizational citizenship behavior*, OCB) anggota legislatif tersebut.

Adanya keterkaitan antara modal sosial dengan pelaksanaan fungsi anggota dewan perwakilan rakyat dapat dijelaskan bahwa modal sosial merupakan serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara mereka. Modal sosial merupakan hubungan berbasis rasa saling percaya yang melekat dalam jejaring sosial (Leana dan Pil, 2008). Selanjutnya kepribadian pada dasarnya merupakan pengaturan dinamis yang tersembunyi dalam diri seseorang yang merupakan suatu sistem

yang akan menciptakan susunan karakteristik tingkah laku, pikiran, dan perasaan seseorang. Kepribadian dipandang sebagai motif tingkah laku dan sistem tingkah laku. Kepribadian mencakup konsep yang didasarkan pada suatu keadaan, proses dan struktur psikologis yang menyebabkan suatu tingkah laku menjadi berarti (Widyasari et al., 2007).

Perilaku OCB adalah sikap membantu yang ditunjukkan oleh anggota organisasi, yang sifatnya konstruktif, dihargai oleh perusahaan tapi tidak secara langsung berhubungan dengan produktivitas individu (Abdullahi dan Gorji, 2014). OCB dapat mempengaruhi modal sosial yang kemudian berdampak pada kinerja pelaksanaan tugas oleh seseorang. Modal sosial dapat mempengaruhi *citizenship behavior* (Podsakoff et al., 2010). Hal ini didasarkan pada alasan bahwa *citizenship behavior* menjadi dasar terbentuknya hubungan personal di antara sesama anggota organisasi (Organ, 2008). *Citizenship behavior* juga memberikan kontribusi pada perkembangan modal sosial kognitif dalam organisasi. Perilaku partisipasi sosial berkontribusi terhadap modal sosial struktural dan modal sosial relasional.

Adanya keterkaitan antara OCB dengan pelaksanaan tugas dan fungsi anggota legislatif didasarkan pada kenyataan bahwa OCB berkaitan dengan sikap dan perilaku mereka dalam melaksanakan tugas. Elanain (2007) mengemukakan bahwa bahwa OCB memiliki hubungan positif dengan kinerja individu. OCB sangat penting dimiliki oleh setiap anggota organisasi karena dapat membangun modal sosial yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi.

Pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada dasarnya adalah tingkat yang menunjukkan seberapa jauh pelaksanaan fungsi anggota legislatif tersebut dapat dijalankan secara aktual. Fungsi dimaksud terdiri dari fungsi penganggaran, legislasi dan fungsi pengawasan. Fenomena yang berkaitan dengan anggota legislatif di Aceh diperoleh data awal bahwa mereka memiliki kemampuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang berbeda satu sama lain. Hal ini terindikasi dari tingkat kemampuan mereka dalam memahami persoalan-persoalan yang

berkaitan dengan tugas dan fungsi legislatif. Munculnya banyak perdebatan yang tidak produktif terutama pada masa pembahasan anggaran daerah misalnya, disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Indikasi ini semakin nyata ketika setiap tahun anggaran, pengesahan anggaran di daerah ini sering terlambat dari jadwal yang ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa modal sosial yang terdiri dari modal sosial dimensi struktural, relasional dan dimensi kognitif dapat dipengaruhi oleh kepribadian dan *organizational citizenship behavior* (OCB). Selanjutnya modal sosial juga memiliki potensi untuk dapat berdampak pada pelaksanaan fungsi anggota dewan perwakilan rakyat yang meliputi fungsi penganggaran, pengawasan dan fungsi legislatif. Hal ini bermakna bahwa keberadaan modal sosial akan dapat memediasi hubungan antara kepribadian dan *organizational citizenship behavior* di satu sisi dengan pelaksanaan fungsi anggota dewan perwakilan rakyat di sisi lain. Hasil survey awal peneliti terhadap sebagian anggota dewan perwakilan rakyat di Aceh mengindikasikan bahwa mereka memiliki kepribadian dan *organizational citizenship behavior* (OCB) yang berbeda satu sama lain. Demikian pula halnya modal sosial yang ada dalam diri mereka baik berkaitan dengan modal sosial dimensi relasional, struktural maupun modal sosial dimensi kognitif. Pelaksanaan fungsi sebagai anggota dewan juga relatif berbeda untuk ketiga fungsi baik fungsi penganggaran, legislatif maupun fungsi pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model revitalisasi modal sosial dikalangan anggota DPRD guna meningkatkan kinerja mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Tinjauan Literature

Organizational Citizenship Behavior (OCB)

Organizational Citizenship Behaviour atau perilaku ekstra peran merupakan kontribusi pekerja diatas dan lebih dari deskripsi kerja formal (Randall, 2010). Organ (2008); Aldag dan Resckhe (2007) memberikan makna bahwa

OCB merupakan penggambaran nilai tambah karyawan dalam perilaku sosial yang positif, konstruktif dan bersifat membantu, dimana perilaku ini tidak berkaitan dengan sistem *reward* namun mampu meningkatkan efektivitas organisasi. Selanjutnya Elanain (2007) menegaskan bahwa OCB merupakan perilaku tambahan yang tidak masuk dalam persyaratan kerja sehingga saat perilaku ini tidak ditampilkan pun tidak akan diberikan hukuman.

Modal Sosial dan Pelaksanaan Fungsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Kajian teoritis dan empiris menyoroti pentingnya modal sosial dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pekerjaan (Aguilera, 2012). Menurut teori modal sosial, modal sosial mengacu pada sumber daya yang bisa digunakan melalui hubungan sosial. Memiliki hubungan sosial secara baik, dapat memperkuat individu dalam mencapai keberhasilan (Castilla et al., 2013). Sejalan dengan teori modal sosial, sejumlah penelitian empiris memperlihatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas oleh seseorang terkait dengan modal sosial yang dimiliki.

Krishna (2012) menyatakan, modal sosial dapat mendorong partisipasi politik, Klesner (2007) menyatakan kepercayaan interpersonal dan keterlibatan dalam organisasi mendorong seseorang untuk lebih aktif secara politik. Penelitian empiris yang dilakukan Carey et al. (2011) menemukan bahwa modal sosial relasional memediasi modal kognitif dan kinerja. Modal sosial relasional memediasi pengaruh modal sosial struktural terhadap kinerja. Modal sosial struktural berhubungan positif dan kinerja tim. Namun hubungan tersebut tidak selalu linier (Yan et al., 2013). Modal sosial dapat meningkatkan kemampuan anggota organisasi untuk bekerja sama satu sama lain sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan (Vishal et al., 2011). Kebanyakan penelitian mengindikasikan bahwa modal sosial struktural dan modal sosial interaksional berhubungan positif dengan kinerja tim (Aaron, 2011).

Kepribadian dan Modal Sosial

Keperibadian pada dasarnya merupakan

pengaturan dinamis yang tersembunyi dalam diri seseorang yang merupakan suatu sistem yang akan menciptakan susunan karakteristik tingkah laku, pikiran, dan perasaan seseorang. Kepribadian dipandang sebagai motif tingkah laku dan sistem tingkah laku. Kepribadian mencakup konsep yang didasarkan pada suatu keadaan, proses dan struktur psikologis yang menyebabkan suatu tingkah laku menjadi berarti (Widyasari et al., 2007). Perilaku manusia baik disadari atau pun tidak disadari didasarkan pada motivasi tertentu yang merupakan kekuatan dinamis dan pengarah perilaku manusia. Orang-orang yang berkepribadian baik memuaskan kebutuhan-kebutuhan psikologis secara kreatif dan produktif.

Seseorang yang memiliki kepribadian yang baik akan cenderung memiliki modal sosial yang baik pula (Seever et al., 2015). Seseorang yang berkepribadian memiliki kesadaran dan penerimaan penuh terhadap diri mereka sendiri. Mereka memahami dan menerima kekuatan dan kelemahan mereka serta menyadari potensi mereka sebagai manusia yang memiliki kemampuan (Widyasari et al., 2007). Kepribadian merupakan salah satu faktor penting keberhasilan seseorang dalam lingkungan sosialnya. Hal ini berarti bahwa kepribadian merupakan salah satu determinan penting yang menentukan modal sosial terutama modal sosial dimensi struktural dan dimensi relasional.

Organizational Citizenship Behavior (OCB) dan Modal Sosial

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, *organizational citizenship behavior* (OCB) sering ditempatkan sebagai variabel dependen. Namun pada kenyataannya, modal sosial juga mempengaruhi *citizenship behavior* (Podsakoff et al., 2010). Hal ini didasarkan pada alasan bahwa *citizenship behavior* menjadi dasar terbentuknya hubungan personal di antara sesama anggota organisasi (Organ, 2008). *Citizenship behavior* juga memberikan kontribusi pada perkembangan modal sosial kognitif dalam organisasi. Perilaku partisipasi sosial berkontribusi terhadap modal sosial struktural dan modal sosial relasional.

Metodologi Penelitian

Desain penelitian ini adalah desain kausalitas yakni menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel penelitian. Revitalisasi modal sosial dan pelaksanaan fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan variabel endogen yang akan dijelaskan oleh dua variabel eksogen meliputi kepribadian dan *organizational citizenship behavior* (perilaku OCB) anggota dewan itu sendiri.

Populasi penelitian adalah seluruh anggota DPR di Aceh terdiri dari anggota DPRA dan DPRK kabupaten kota yang berjumlah 728 orang. Sampel penelitian dibatasi hanya pada 175 orang anggota DPRA, DPRK Aceh Besar, DPRK Pidie, DPRK Banda Aceh dan DPRK Sabang. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mengedarkan kuesioner kepada anggota DPRD. Kuesioner tersebut terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berhubungan dengan karakteristik responden yang terdiri dari jenis kelamin, usia, status perkawinan dan tingkat pendidikan. Bagian kedua berisi pernyataan-pernyataan berkaitan dengan variabel penelitian.

Variabel penelitian terdiri dari pelaksanaan fungsi pengawasan anggota dewan perwakilan rakyat dan modal sosial. Fungsi pengawasan terdiri dari 4 indikator. Indikator tersebut diadopsi dari Ashidiqie (2005) meliputi (1) Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana; (2) menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan; (3) Menumbuhkan motivasi dan perbaikan kinerja eksekutif; (4) mendorong pengurangan, peniadaan penyimpangan, dan (5) Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran modal sosial mengacu difokuskan pada modal sosial dimensi relasional menggunakan 5 indikator yang dikembangkan oleh Kale et al (2000) yang didasarkan pada studi Dyer dan Singh (2008) dan Napiet dan Ghoshal (2008). Indikator-indikator tersebut meliputi: (1) bersinergi secara baik, (2) saling percaya satu sama lain, (3), saling menghargai, (4) memiliki persahabatan yang baik, dan (5) memiliki

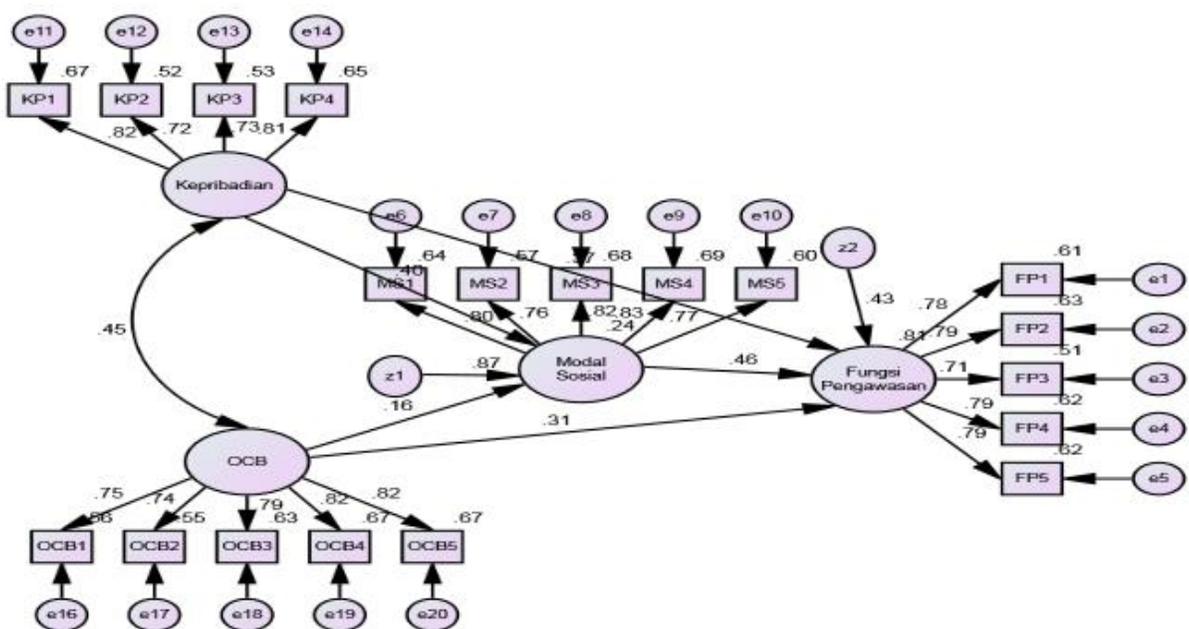
hubungan sosial yang baik. Variabel *organizational citizenship behavior* (OCB) diukur dengan menggunakan lima indikator terdiri dari *altruisme, courtesy, sportmanship, civic virtue* dan *conscientiousness* atau *generalized compliance* (Podsakoff et al., 1997; Organ, 2000). Selanjutnya skala untuk mengungkap kepribadian yang terkait variabel *Big Five Personality* adalah sesuai dengan teori Goldberg (Pervin, 2000), yaitu faktor *extraversion, agreeableness, conscientiousness, emotional stability* dan *openess to experience*.

Model analisis data yang digunakan terdiri dari statistik deskriptif dan statistik inferensi. Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan masing-masing variabel. Peralatan statistik deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan penilaian anggota DPRD terhadap fungsi pengawasan, modal sosial, kepribadian dan perilaku OCB. Selanjutnya statistik inferensi digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel. Dalam hal ini, peneliti menggunakan *structural equation model* (SEM) yang akan dioperasionalkan dengan software AMOS. Penggunaan SEM sebagai alat analisis data melalui beberapa tahapan analisis terdiri dari *confirmatory factor analysis* (CFA) dan kemudian dilanjutkan dengan *full structural model*.

Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan yang direncanakan, sampel penelitian sebanyak 206 orang anggota dewan perwakilan rakyat di Aceh. Mereka adalah anggota DPRA, DPRK Aceh Besar, DPRK Pidie, DPRK Banda Aceh dan anggota DPRK Sabang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan kuesioner penelitian kepada masing-masing anggota DPRD tersebut. Pengedaran kuesioner berlangsung selama satu bulan mengingat tempat dan lokasi yang berjauhan. Kuesioner yang berhasil dikumpulkan hanya 184 eksamplar. Artinya terdapat 22 kuesioner yang tidak kembali. Setelah kuesioner terkumpul, kemudian dilakukan proses penkodingan data. Pada tahap ini terdapat 9 kuesioner yang tidak lengkap terisi. Akhirnya kuesioner yang diolah dan dianalisis dalam penelitian ini hanya 175 eksamplar, sehingga jumlah sampel penelitian menjadi 175 orang anggota DPRD.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa kepribadian dan perilaku OCB berpengaruh terhadap modal sosial dan fungsi pengawasan DPRD. Selanjutnya modal sosial juga berpengaruh terhadap fungsi pengawasan anggota legislatif tersebut. Hasil full structural model yang memperlihatkan hubungan sebab akibat antar variabel-variabel tersebut seperti dalam Gambar 1.



Gambar 1.
Hasil Full Structural Model

Gambar 1 di atas tidak hanya memperlihatkan nilai koefisien jalur (Standardized Regression Weights) masing-masing variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen, tetapi juga memperlihatkan nilai loading factor masing-masing indikator (manifest variable) terhadap variabel laten. Hasil full structural model memperlihatkan nilai koefisien estimasi masing-masing konstruk eksogen (kepribadian dan OCB) terhadap modal sosial dan fungsi pengawasan DPRD seperti terlihat dalam Tabel 1.

Tabel 1 Koefisien Estimasi Masing-masing Variabel

			Estimate	C.R.	P
Modal_Sosial	<---	OCB	.158	1.784	.074
Modal_Sosial	<---	Kepribadian	.400	4.222	***
Fungsi_Pengawasan	<---	OCB	.315	5.170	***
Fungsi_Pengawasan	<---	Modal_Sosial	.458	6.989	***
Fungsi_Pengawasan	<---	Kepribadian	.373	5.478	***

Sumber : Data Primer (Diolah), 2018
*** = 0,001

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dipahami bahwa konstruk eksogen (kepribadian dan perilaku OCB) berpengaruh terhadap konstruk endogen (modal sosial dan fungsi pengawasan anggota DPRD). Selain itu, modal sosial juga berpengaruh secara langsung terhadap fungsi pengawasan. Sehingga keberadaan modal sosial dapat dimaknai sebagai variabel *intervening* (perantara) antara kepribadian dan perilaku OCB di satu sisi dengan fungsi pengawasan di sisi lain. Dengan kata lain, kepribadian dan perilaku OCB tidak hanya dapat berpengaruh secara langsung terhadap fungsi pengawasan, tetapi juga dapat melalui modal sosial sebagai variabel *intervening* (perantara).

Kepribadian berpengaruh positif dan signifikan terhadap modal sosial anggota DPRD, ditunjukkan oleh nilai koefisien estimasi sebesar 0,400 dengan nilai *p-value* sebesar $0,001 < 0,05$. Pengaruh langsung (*direct effect*) kepribadian terhadap modal sosial sebesar 16,0 persen $(0,400)^2$. Hal ini berarti bahwa anggota legislatif dengan kepribadian relatif baik akan cenderung memiliki modal sosial yang juga relatif baik. Artinya, terdapat hubungan searah antara kepribadian dengan modal sosial yang

diindikasikan dengan kemampuan mereka bersosialisasi dengan lingkungan kerja mereka terutama sesama anggota legislatif.

Selanjutnya perilaku OCB juga berpengaruh positif terhadap modal sosial anggota DPRD dengan nilai koefisien estimasi sebesar 0,158. Namun pengaruh tersebut tidak signifikan pada keyakinan 95%, ditunjukkan oleh nilai *p-value* sebesar $0,074 > 0,05$. Hal ini berarti signifikansi perilaku OCB terhadap modal sosial hanya wujud pada keyakinan 92,5 persen. Anggota

DPRD dengan perilaku OCB relatif baik akan memiliki modal sosial yang juga relatif baik bila dibandingkan dengan mereka yang memiliki perilaku OCB kurang baik. Dengan kata lain, hubungan antara kedua variabel tersebut juga searah dan signifikan pada keyakinan 92,5%.

Analisis Pengaruh Kepribadian dan Perilaku OCB terhadap Fungsi Pengawasan Anggota DPRD

Kepribadian berpengaruh positif dan signifikan terhadap fungsi pengawasan anggota DPRD, ditunjukkan oleh nilai koefisien estimasi sebesar 0,373 dengan nilai *p-value* sebesar $0,001 < 0,05$. Pengaruh langsung (*direct effect*) kepribadian terhadap fungsi pengawasan sebesar 13,91 persen $(0,373)^2$. Hal ini berarti bahwa anggota legislatif dengan kepribadian relatif baik akan cenderung melaksanakan tugasnya dalam menjalankan fungsi pengawasan secara lebih baik. Artinya, terdapat hubungan searah antara kepribadian dengan kecenderungan mereka untuk melaksanakan fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi anggota legislatif.

Selanjutnya perilaku OCB juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap fungsi pengawasan anggota DPRD dengan nilai koefisien estimasi sebesar 0,315 dengan nilai *p-*

value sebesar $0,001 < 0,05$. Anggota DPRD dengan perilaku OCB relatif baik akan cenderung melaksanakan fungsi pengawasan yang lebih baik bila dibandingkan dengan mereka yang memiliki perilaku OCB kurang baik.

Analisis Pengaruh Modal Sosial terhadap Fungsi Pengawasan Anggota DPRD

Modal sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap fungsi pengawasan anggota DPRD, ditunjukkan oleh nilai koefisien estimasi 0,458 dan nilai *p-value* $0,001 < 0,05$. Pengaruh langsung modal sosial terhadap fungsi pengawasan sebesar 20,98 persen $(0,458)^2$. Anggota DPRD dengan modal sosial lebih baik akan melaksanakan fungsi pengawasan yang lebih baik pula bila dibandingkan dengan mereka yang memiliki modal sosial kurang baik. Sebaliknya anggota DPRD dengan modal sosial kurang baik, maka fungsi pengawasan yang dijalankannya lebih buruk bila dibandingkan dengan mereka yang memiliki modal sosial relatif baik. Hal ini berarti terdapat hubungan searah dan signifikan antara modal sosial dengan fungsi pengawasan anggota DPRD.

Analisis Pengaruh Kepribadian terhadap Fungsi Pengawasan Anggota DPRD melalui Modal Sosial

Koefisien estimasi kepribadian terhadap modal sosial sebesar 0,400 dan koefisien estimasi modal sosial terhadap fungsi pengawasan anggota DPRD sebesar 0,458. Dengan demikian pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) kepribadian terhadap fungsi pengawasan anggota DPRD melalui modal sosial sebesar 18,32 persen $(0,400 \times 0,458)$, lebih besar bila dibandingkan dengan pengaruh langsung (*direct effect*) kepribadian terhadap fungsi pengawasan sebesar 13,91 persen. Dengan demikian dapat diartikan bahwa keberadaan modal sosial dapat memperkuat pengaruh kepribadian terhadap fungsi pengawasan anggota DPRD. Hasil pengolahan data memperlihatkan nilai *sig* untuk pengaruh kepribadian terhadap modal sosial sebesar 0,001 (signifikan), dan nilai *sig* untuk pengaruh kepribadian terhadap fungsi pengawasan anggota DPRD sebesar 0,001 (signifikan). Selanjutnya nilai *sig* pengaruh

modal sosial dan kepribadian secara bersamaan terhadap fungsi pengawasan anggota DPRD juga menunjukkan angka masing-masing sebesar 0,001 (signifikan). Sehingga dapat diartikan bahwa modal sosial memediasi pengaruh kepribadian terhadap fungsi pengawasan. Efek mediasi yang dimunculkan oleh modal sosial adalah *partial mediation* (mediasi parsial).

Analisis Pengaruh Perilaku OCB terhadap Fungsi Pengawasan Anggota DPRD melalui Modal Sosial

Koefisien estimasi perilaku OCB terhadap modal sosial sebesar 0,158 dan koefisien estimasi modal sosial terhadap fungsi pengawasan anggota DPRD sebesar 0,458. Dengan demikian pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) perilaku OCB terhadap fungsi pengawasan anggota DPRD melalui modal sosial sebesar 7,24 persen $(0,158 \times 0,458)$, lebih kecil bila dibandingkan dengan pengaruh langsung (*direct effect*) sebesar 9,92 persen. Dengan demikian dapat diartikan bahwa keberadaan modal sosial dapat tidak memperkuat pengaruh perilaku OCB terhadap fungsi pengawasan anggota DPRD. Hasil pengolahan data memperlihatkan nilai *sig* untuk pengaruh perilaku OCB terhadap modal sosial sebesar 0,001 (signifikan), dan nilai *sig* untuk pengaruh perilaku OCB terhadap fungsi pengawasan anggota DPRD sebesar 0,001 (signifikan). Selanjutnya nilai *sig* pengaruh modal sosial dan perilaku OCB secara bersamaan terhadap fungsi pengawasan anggota DPRD juga menunjukkan angka masing-masing sebesar 0,001 (signifikan). Sehingga dapat diartikan bahwa modal sosial memediasi pengaruh perilaku OCB terhadap fungsi pengawasan. Efek mediasi yang dimunculkan oleh modal sosial adalah *partial mediation* (mediasi parsial).

Simpulan dan Saran

1. Kepribadian dan perilaku OCB berpengaruh positif terhadap modal sosial anggota DPRD di Aceh. Semakin baik kepribadian dan perilaku OCB anggota legislatif tersebut akan semakin baik pula modal sosial mereka yang diindikasikan dengan kemampuan mereka untuk berinteraksi secara sosial dengan semua pihak terutama sesama anggota legislatif. Dengan demikian disimpulkan

bahwa kepribadian dan perilaku OCB merupakan faktor dominan dalam memperkuat (merevitalisasi) modal sosial dikalangan anggota legislatif tersebut.

2. Kepribadian dan perilaku OCB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan anggota DPRD di Aceh. Semakin baik kepribadian dan perilaku OCB anggota legislatif tersebut akan semakin baik pelaksanaan fungsi pengawasan yang mereka lakukan. Sebaliknya, penurunan kualitas kepribadian dan perilaku OCB berdampak buruk pada penurunan pelaksanaan fungsi pengawasan.
3. Modal sosial memediasi pengaruh kepribadian dan perilaku OCB terhadap fungsi pengawasan anggota DPRD di Aceh. Efek mediasi yang ditimbulkan oleh modal sosial sebagai variabel perantara adalah mediasi penuh (*partial mediation*). Peningkatan kualitas modal sosial di kalangan anggota dewan sangat menentukan kualitas fungsi pengawasan yang mereka lakukan sebagai anggota legislatif.

Saran-saran

Mengacu pada kesimpulan yang diuraikan di atas, maka yang menjadi saran dan rekomendasi penelitian ini sebagai berikut.

1. Pimpinan DPRD di Aceh diperlukan mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan kepribadian dan perilaku OCB anggotanya. Secara operasional upaya peningkatan kepribadian dan perilaku OCB dikalangan anggota legislatif dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kekompakan antara sesama anggota legislatif. Adanya keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama misalnya, dapat membentuk kepribadian dan perilaku OCB yang lebih baik dikalangan anggota legislatif tersebut.
2. Pimpinan DPRD di Aceh perlu meningkatkan modal sosial masing-masing anggotanya. Upaya peningkatan modal sosial dapat dilakukan dengan meningkatkan sinergisitas dalam pelaksanaan tugas, membangun sikap saling percaya dan saling menghargai satu sama lain serta menjalin persahabatan dan

hubungan sosial secara baik di antara sama anggota DPRD.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini didukung oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) dalam bentuk dana hibah skim penelitian dosen pemula (PDP). Kami berterima kasih kepada tim teknis dan anggota yang terlibat secara tidak langsung dalam penelitian ini. Terima kasih juga tidak lupa juga kepada P3M STIES yang telah memberikan dukungan penelitian dalam bentuk penyediaan sarana penelitian dan konsultasi teknis.

Daftar Pustaka

- Aaron W. Clopton. 2011. Social capital and team performance, *Team Performance Management*, 17(7/8): 369-381.
- Abbasi, A. et al. 2011. Social Capital and Individual Performance: A Study of Academic Collaboration. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 63(12): 1-18.
- Abdullahi, S., dan Gorji, M. 2014. The relationship between social capital and organizational citizenship behavior in universities, *Advanced Research in Economic and Management Sciences*, 17, 68-75.
- Aguilera, M. B. 2012. The impact of social capital on labor force participation: evidence from the 2000 social capital benchmark survey. *Social Science Quarterly*, 83, 853-874.
- Aldag, Ray dan Reschke, Wayne. 2007. *Employee Value Added: Measuring Discretionary Effort and Its Value to the Organization* Center for Organization Effectiveness Inc. USA. London.
- Baron, R.M., and Kenny, D.A. 1986. The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations, *Journal of Personality and Social Psychology*, 51 (6):1173–1182.

- Carey, S., Lawson, B., and Krause, D.R. 2011. Social Capital Configuration, Legal Bonds and Performance in Buyer–Supplier Relationships. *Journal of Operations Management* 29: 277–288.
- Castilla, E. J., Lan, G. J., & Rissing, B. A. 2013. Social networks and employment: mechanisms (part I). *Sociology Compass*, 7, 999-1012.
- Dyer, J., and Singh, J. 2008. The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage. *Academy of Management Review* 23 (4): 660–679.
- Elanain, H. A. 2007. Relationship between personality and organizational citizenship behavior: Does personality influence employee citizenship? *International review of Business Research Papers*, 3, 31-43
- Klesner, J. L. 2007. Social Capital and Political Participation in Latin America: Evidence from Argentina, Chile, Mexico, and Peru, *Latin American Research Review*, 42(2), 1-32.
- Krishna, A. 2012. Enhancing Political Participation in Democracies: What is the Role of Social Capital? *Comparative Political Studies* 35: 427–60.
- Labay, I., Sujianto., dan Zulkarnaini. 2012. Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan, Motivasi Kerja, Dan Kinerja Anggota DPRD, *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(2), 59-141.
- Leana, C. R., dan Pil, F. K. 2008. Social Capital and Organizational Performance: Evidence from Urban Public Schools, *Organization Science*, 17(3), 353–366.
- Macke, J., dan Dilly, E. K. 2010. Social Capital Dimensions in Collaborative Networks: The Role Of Linking Social Capital, *International Journal of Social Inquiry*, 3(2), 121-136.
- Oliveira, J. F. D. 2013. The Influence of the Social Capital on Business Performance: an Analysis in the Context of Horizontal Business Networks. *RAM. Revista de Administração Mackenzie*, 14(3), 209-235.
- Organ, D. W., dan Ryan, K. 2008. A meta-analytic review of attitudinal and dispositional predictors of organisational citizenship behavior. In: *Personnel Psychology* 48, 775-802.
- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., & Bachrach, D. G. 2010. Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. *Journal of Management*, 26: 513-563.
- Randall, D. M. 2010. The Consequences Of Organizational Commitment: Methodological Investigation. *Journal of Organizational Behavior*, 11: 361-378.
- Robbins, S.P. 2008 *Perilaku Organisasi*, Edisi Kesepuluh, Indeks, Jakarta.
- SeEVERS, M. T., Johnson, B. R., dan Darnold, T. C. 2015. Social Networks In The Classroom: Personality Factors As Antecedents Of Student Social Capital, *American Journal Of Business Education*, (8)3, 193-206.
- Tsai, W., and Ghoshal, S. 2008. Social Capital and Value Creation: The Role of Intrafirm Networks. *Academy of Management Journal* 41 (4): 464–476.
- Vishal K. Gupta, Rui Huang, Ali A. Yayla. 2011. Social Capital, Collective Transformational Leadership and Performance: A Resource-Based View of Self-Managed Teams, *journal of managerial issues*, 23(1), 31-45.
- Widyasari, Syahrini dan Santosa. 2007. Pengaruh Kepribadian Terhadap Kinerja Karyawan Berpendidikan Tinggi: Analisis Pada Perusahaan Peternakan di Jawa Tengah dan Daerah Istimewah

Yogyakarta, Jurnal Kinerja, 11(1), 40-49.

Yan Yu, Jin-Xing Hao, Xiao-Ying Dong, Mohamed Khalifa. 2013. A multilevel model for effects of social capital and knowledge sharing in knowledge-intensive work teams, *International Journal of Information Management*, 33: 780–790.